BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam narasi sejarah peradaban manusia, wajah agama sering kali menampakan warna yang tidak ramah. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali gesekan yang terjadi berbenturan antar-agama. Tidak terhitung seberapa banyak korban yang mengatasnamakan agama. Keberadaan agama menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mereka mempercayai kekuatan besar diluar dirinya dan tunduk kepada hal besar tersebut. Setiap sendi kehidupannya selalu di dasari atas kekuatan tersebut bahkan menyebutkan orang yang tidak beragama pun itulah agama atau yang diyakininya ketidakberagamaan tersebut. Dengan perkembangan zaman perubahan perilaku keberagamaan membawa manusia ke arah yang lain, mereka mulai menerapkan keagamaan dalam tatanan yang lain seperti dalam mengelola kehidupan masyarakat atau dalam istilah lain dalam kehidupan berpolitik. Dari sejak awal perpolitikan selalu berkembang dan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang terus maju, sehingga perlakuan politik pun semakin kompleks dan intens terhadap kehadiran agama. Perubahan arah pandang komunikasi agama semakin luas dan diterapkan diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang menyangkut dalam perpolitikan yang berkembang. Masyarakat semakin sadar komunikasi perlu adanya penyelarasan dalam sektor perpolitikan.

Dalam dinamika politik modern, komunikasi menjadi senjata utama para aktor politik dalam membentuk citra, membangun relasi, serta meraih kepercayaan publik. Di tengah globalisasi dan derasnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi politik tidak hanya menyangkut penyampaian pesan, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai ini bisa berupa nilai kemanusiaan, lingkungan, ataupun nilai agama. Di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandung dikenal dengan religius dan memiliki kultur Islam yang kuat, nilai-nilai agama sering kali menyatu dalam praktek politik, termasuk dalam cara para politikus berkomunikasi. Perkembangan partai politik yang berkembang di kota Bandung sangat pesat termasuk salah satu partai politik yang menduduki kursi

parlemen paling banyak di daerah tersebut selain yaitu partai berbasis Islam maupun partai basis non-Islam yaitu PDI Perjuangan. Dari data yang diinformasikan oleh data Badan Pusat Statistik Kota Bandung penganut agama Islam pada tahun 2019 memiliki jumlah yang lebih besar yaitu dengan presentase 92,17 % atau sekitar 1.731. 636 jiwa dan PDI Perjuangan menjadi basis kedua pemilihan warga Bandung setelah partai PKS sebagai partai basis Islam.

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia. Dalam Pemilu Legislatif 2024, PDI Perjuangan tetap menjadi partai dengan perolehan suara nasional tertinggi, yaitu 25.384.673 suara. Penetapan hasil tersebut terkait dengan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilu 2024 (ANTARA News Mataram, 2024). Data ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih memiliki posisi politik penting dalam demokrasi Indonesia.

Secara ideologis, PDI Perjuangan menempatkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai asas partai. Dalam AD/ART, partai ini menyatakan jati dirinya sebagai partai yang bercorak kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Watak partai disebut sebagai gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan progresif revolusioner. PDI Perjuangan juga menyebut dirinya sebagai wadah komunikasi politik untuk mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.

Namun, posisi PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis sering menimbulkan pertanyaan menarik ketika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai partai yang tidak berasas Islam, PDI Perjuangan tetap memiliki ruang komunikasi dengan masyarakat Muslim. Salah satu bentuknya tampak melalui keberadaan Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan. Kajian Ronaldi dan Bakti menunjukkan bahwa BAMUSI menjadi bagian dari kerja persuasi politik PDI Perjuangan, terutama dalam memperkuat identitas partai dan merespons stigma terhadap PDI Perjuangan(Ronaldi & Bakti, 2023).

Di sisi lain, komunikasi politik Islam tidak hanya menyangkut simbol agama. Komunikasi politik Islam juga berkaitan dengan pesan moral, legitimasi, partisipasi, dan risiko polarisasi jika tidak dikelola secara bijak (Kahpi et al., 2024).

Karena itu, kajian tentang Islam dan komunikasi politik perlu diarahkan pada nilai, pesan, praktik, dan dampaknya terhadap kehidupan publik.

Konsep humanisme Islam menjadi penting untuk membaca praktik komunikasi tersebut. Dalam pemikiran Kuntowijoyo, humanisme Islam dapat dipahami melalui kerangka ilmu sosial profetik. Kerangka ini memuat tiga nilai utama, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nilai tersebut berakar dari gagasan amar ma'ruf, nahi munkar, dan iman kepada Allah sebagaimana terkandung dalam QS. Ali Imran ayat 110(Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.). Humanisme teosentris menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi, tetapi tujuan sosialnya tetap untuk mengangkat martabat manusia.

Martabat manusia sangat penting adanya dalam komunikasi politik terlebih mayoritas penganut agama terbesar yang ada di Jawa Barat. Ini akan menjadi strategi kongkrit dalam mendapatkan dukungan politik yang lebih luas karena menyangkut dalam status manusia sebagai khalifah yang memiliki kedudukan sehingga ingin dihargai. Serta dalam menjalankan kehidupan yang demokratis maka negara harus mampu menempatkan komunikasi sebagai modal utama dalam mencapai negara yang aman politik dan ujaran kebencian.

Komunikasi politik menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Partai politik tidak hanya bekerja untuk meraih suara. Partai juga membangun makna, menyampaikan nilai, membentuk citra, dan menciptakan hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi kampanye. Komunikasi politik juga perlu dilihat sebagai praktik sosial, etis, dan ideologis.

Dalam bahasa komunikasi yang digunakan oleh politikus, mereka memberikan legitimasi moral dan religius terhadap politik untuk mencapai kepercayaan publik. Sebagai contoh ketika politikus berkomunikasi mereka biasanya mengklaim bahwa kebijakan dan perilaku mereka sesuai dengan syariat Islam, agar dianggap sah dan mendapat dukungan dari mayoritas pemeluk agama. Penggunaan bahasa Islam sering dipakai untuk membangun identitas politik berbasis agama dan membedakan kelompok, yang dianggap kelompok kami dengan mereka yang tidak kelompok kami. Hal ini dianggap bisa meningkatkan loyalitas dan mobilisasi pemilih berbasis sentimen keagamaan.

Dalam masa kampanye simbol-simbol keagamaan seperti sorban, kopiah, atau kutipan ayat Al-Qur'an dan hadits digunakan untuk menunjukan kesholehan dalam berkomunikasi. Ini merupakan strategi retoris yang kuat dalam mendapatkan perhatian sifat religius masyarakat. Selain itu, kedekatan tokoh politik terhadap publik figur masyarakat dalam keberagamaan menjadi salah satu daya tarik juga dalam meraih kesuksesan pemilih, karena dengan hal tersebut mobilisasi yang dilakukan oleh pemimpin keagamaan menggiring masyarakat dengan sukarela suaranya mereka sesuai dengan pemimpin kegamaan tersebut, sehingga politikus tersebut dengan mudah mendapatkan pemilih yang banyak. Praktik ini pun tidak lepas dari kritik, beberapa kalangan milenial yang menilai bahwa penggunakan bahasa Islam dalam politik seringkali manipulatif dan menyesatkan umat. Selain itu, bisa menimbulkan konflik sektarian atau diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Potret birokrasi, baik pada kasus rezim merampok negara atau pun sentralisasi kebijakan oleh pemerintah, merupakan potret penyelenggaraan birokrasi yang rapuh dari seorang pemimpin yang tentunya masih sangat jauh dari kata mampu menjalankan *good governance* yang memanusiakan manusia. Identitas birokrasi yang masih menjadi kebiasaan mereka yang menjadi ciri sebuah partai menjadi ajang keberhasilan meraih kepercayaan masyarakat. Kebiasaan dalam kebijakan membawa perubahan pola pikir yang semakin berkembang dan menjadi keterkaitan antara keberhasilan dan kebijakan yang menguntungkan sebuah birokrasi.

Bercermin dari apa yang ditunjukkan oleh kebanyakan pemimpin saat ini dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat semakin memiliki kepercayaan yang tipis dan semakin kekurangan figur, sehingga potensi masyarakat untuk berkembang pun sulit digerakkan kalau tidak dengan usaha sendiri. Bagaimanapun kemajuan dari sistem pemerintahan yang dibangun oleh seorang pemimpin bergantung dari kemampuannya menggerakkan potensi secara efektif seluruh kekuatan masyarakat agar memiliki disiplin dan patuh terhadap kekuatan hukum yang berlaku, saling menghargai hak individu dan hak komunal yang dimiliki masyarakatnya (Irsan, 2014).

Seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) yang digulirkan pada 1 Januari 2001, sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi dan/atau diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yang telah memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Terkait dengan hal ini, Smith dalam Maani (2005:27) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Namun upaya desentralisasi akan menjadi masalah apabila pejabat politik dan/atau pejabat birokrasinya tidak profesional.

Terlepas dari persoalan tersebut, untuk menjadikan pemimpin politik atau pemerintahan yang humanis, tentunya harus mengikuti banyak petunjuk. Bagi pemimpin yang beragama Islam, misalnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu mendekati masyarakat dengan cara yang humanis tentunya tidak lepas dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. menjelaskan bahwa kepemimpinan Rasulullah terhadap berbagai perubahan dunia yang telah dihasilkan dan menjadi ikon penting bagi rakyatnya (umatnya) dalam keteladanannya, antara lain; (1) mampu menegakkan rasa keadilan; (2) memiliki rasa cinta, empati, dan simpati yang ditujukan kepada sesama umat manusia; (3) memegang teguh prinsip kejujuran; (4) menjunjung tinggi prinsip amanah; (5) memiliki kecerdasan dalam dimensi intelektual, emosional, dan spiritual; dan (6) bersikap transparan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya (Hayat, 2014).

Begitu juga dengan setiap pemimpin yang memiliki agama berbeda dapat prinsip kepemimpinan yang baik melalui agamanya masing-masing. Disamping ajaran agama dan konsep teoritis yang sangat bermanfaat, harus pula diperhatikan pemahaman sosial budaya, yakni seorang pemimpin itu menjalankan amanah kepemimpinannya. Dan yang penting, seorang pemimpin harus mampu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada pada lingkungan masyarakatnya.

Perubahan-perubahan yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Sanapiah (Sanapiah, 2005), antara lain:

1. Memangkas berbagai birokrasi yang sudah tidak relevan.
2. Menerapkan *contestability* (membandingkan pelayanan yang dilakukan unit organisasinya dengan organisasi lain untuk melihat efisiensi dan efektivitasnya), bahkan mengembangkan kontrak dengan sektor swasta (jika hal ini merupakan jalan paling efektif dan efisien yang harus ditempuh).
3. Menggunakan berbagai teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengembangkan kebijakan publik yang berorientasi kepada pelanggan (*customer focus*).

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alaamin* mengajarkan prinsip-prinsip humanisme, yakni penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini sesungguhnya dapat menjadi pondasi etis dan moral dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks politik yang syarat dengan kepentingan, persaingan, bahkan konflik. Humanisme Islam dalam komunikasi politik dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih etis, inklusif, dan membangun dialog yang produktif antara politikus dan masyarakat. Dengan adanya humanisme Islam ini menjadi harapan keberadaan komunikasi politik yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan sehingga dalam proses berpolitik nantinya mampu menghasilkan politikus yang menjungjung kebaikan di setiap kebijakannya.

Namun kenyataannya, komunikasi politik di Indonesia seringkali tercemar oleh ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan retorika yang menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Fenomena ini terjadi di wilayah Kota Bandung, meskipun wilayah ini memiliki basis keislaman yang kuat dan tokoh-tokoh politik yang kerap mengusung identitas keagamaan dalam kampanye maupun narasi publiknya. Dari berita yang dimuat oleh detik.com pada hari Jum'at, 29 November 2024 jam 20.30 WIB menyebutkan konten ujaran kebencian di Kota Bandung terbanyak se-Jawa Barat, setidaknya ada 192 pelanggaran konten. Menurut Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Jabar Muamarullah menyatakan "Dalam pengawasan

konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahap kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah menemukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. Yang di dalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sementara itu di tingkat kabupaten/kota di Jawa barat. Kota Bandung menjadi wilayah dengan ujaran kebencian yang paling banyak, yaitu 56 kasus disusul dengan Kabupaten Garut 23 kasus, Kota Bogor 23 kasus, Bandung Barat 10 kasus ujaran kebancian dan 3 berita hoaks, Kota Tasikmalaya 4 kasus ujaran kebencian, Kota Sukabumi 3 kasus, Cianjur 1 kasus ujaran kebencian, dan 1 berita hoaks, sementara Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Depok masing-masing memiliki 1 kasus ujaran kebencian dan berita hoaks." Ditambah dari berita kompas.id pada tanggal 22/11/2024 merinci ada 181 akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian terdiri dari 171 akun Tiktok, 8 di akun Instagram, 1 akun X, dan 1 dari kanal berita. Temuan ini hasil dari pengawasan Bawaslu Jabar pada 1 Oktober hingga 19 November 2024. Adapun181 konten medsos berisi 146 akun memuat ujaran kebencian personal dan agama dari paslon tertentu dalam pilgub Jabar. Sementara 35 akun menyebarkan berita hoaks.

Hal ini menimbulkan pernyataan kritis: sejauh mana nilai-nilai humanisme Islam benar-benar diimplementasikan dalam praktek komunikasi para elit politik oleh sebuah partai politik. Apakah prinsip-prinsip seperti kejujuran, empati, keadilan dan penghargaan terhadap perbedaan masih menjadi ruh dalam komunikasi politik yang mereka gunakan. Karena dengan banyaknya politikus dan program-program yang banyak disampaikan oleh para politikus sehingga banyak yang mempertanyakan apakah hal tersebut murni untuk kepentingan dan kebaikan bersama atau malah sebaliknya.

Humanisme Islam bukan sekadar idealisme normatif, melainkan dapat menjadi kerangka praksis yang membentuk cara politikus berkomunikasi, menyusun narasi, dan membangun hubungan dengan konstituen. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana para politikus di Jawa Barat khususnya partai politik PDI Perjuangan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam komunikasi mereka, baik dalam wacana publik, kampanye, media sosial, maupun dalam interaksi langsung dengan masyarakat. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya

dalam upaya memperbaiki etika komunikasi politik, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur keagamaan dan kebudayaan lokal. Keberadaan humanisme Islam di ranah politik diharapkan membawa perubahan yang signifikan baik dikalangan politikus ataupun perubahan untuk masyarakat secara keseluruhan. Karena secara konsep mengandung kepada keyakinan yang menyeluruh sehingga masyarakat dapat digiring dengan mudah dan arah yang jelas.

Humanisme pada dasarnya merupakan suatu konsep moral yang mana diorientasikan pada tujuan-tujuan etis dan konsekuensi moral (Murchland, 2019). Pemahaman humanisme terus berkembang sejalan dengan peranan manusia yang berkembang mengikuti perubahan daya tarik manusia. Semakin banyak manusia menyentuh berbagai aspek kehidupan semakin terbuka juga humanisme mengikuti perubahan tersebut. Perubahan ini sejalan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan di lingkungan masyarakat, pengalihan fokus pandangan masyarakat yang semakin luas dan terbuka mengalihkan mereka untuk terus memiliki peran dalam meningkatkan tarap kehidupan dan peran dilingkungan masyarakat itu sendiri.

Humanisme adalah suatu pemikiran filsafat yang menjungjung tinggi nilai-nilai dan kedudukan manusia. Humanisme sebagai istilah dalam sejarah intelektual yang sering digunakan dalam bidang filsafat, pendidikan dan literatur, selalu menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan. Objek utama humanisme adalah sifat hakiki manusia beserta batas-batas dan kecenderungan alamiahnya (Hadi, 2012). Dengan humanisme ini manusia dikembalikan dengan sifat alamiahnya sebagai dasar dalam menentukan pilihan hidupnya dan jalan mengikuti orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama.

Islam merupakan kepercayaan berasal dari bahasa arab *aslama* yang berarti selamat atau kedamaian, menerima, menyerah atau tunduk. Dengan begitu Islam juga bisa diartikan sebagai keselamatan, jalan kedamaian atau berserah diri kepada kekuatan yang ada di luar dirinya. Islam adalah agama monoteistik yang lahir sekitar abad ke-6 yang dirisalahkan melalui Nabi Muhammad S.A.W yang penganutnya disebut sebagai seorang muslim (Zazuli, 2018).

Humanisme Islam melarang keras menuhankan manusia atau makhluk lainnya, namun tidak juga merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa. Humanisme dalam ajaran Islam didasarkan pada hubungan antar

sesama manusia baik itu hubungan sesama muslim maupun dengan penganut agama lainnya (Baedhowi, 2008).

Jawa Barat sebagai provinsi dengan persebaran jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional. Tokoh-tokoh politik di Jawa Barat pun cukup banyak dan kerap menjadi sorotan nasional, baik karena popularitas maupun karena kontroversial karena mengandung narasi keagamaan yang meraka usung. Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang padat menambah dinamika politik diperkotaan. Di lain sisi, kultur sunda dengan menjunjung tinggi nilai "*someah hade ka semah, silih asih, silih asah, silih asuh*" juga modal sosial yang dapat memperkuat praktik komunikasi politik humanis. Perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal ini semestinya menciptakan ekosistem politik yang sehat, namun sayangnya belum terealisasikan dengan kenyataanya. Kemenangan yang terealisasikan oleh partai politik PDI Perjuangan yang berbasis nasional dapat mendapatkan suara yang mayoritas muslim di Kota Bandung. Jelas ini menjadi sorot perhatian sejauh mana partai tersebut mengiring masyarakat supaya dapat memihak dan memilih partai yang basisnya nasional. Strategi komunikasi apa yang digunakan oleh partai tersebut dalam menjalankan misinya memenangkan pemilu yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana prinsip humanisme Islam hadir dan diaktualisasikan dalam komunikasi para politikus di partai PDI Perjuangan. Penelitian ini akan menelaah bentuk komunikasi mereka melalui pidato politik, pernyataan politik, pernyataan media sosial, serta pengaruhnya terhadap pemilihan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk memahami praktik komunikasi politik kontemporer, tetapi juga menawarkan alternatif model komunikasi politik yang lebih beradab dan berlandaskan nilai-nilai kepercayaan yang diharapkan mampu menggiring mobilisasi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana pengaruh nilai-nilai humanisme Islam dapat diterapkan dalam komunikasi politik para politikus, seperti latar pendidikan keagamaan, budaya organisasi partai, tekanan elektoral, hingga ekspetasi konstituen. Dengan demikian kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap keilmuan komunikasi politik bernuansa

Islam, serta kontribusi praktis bagi para aktor politik dalam membangun komunikasi yang lebih etis, jujur, dan humanis.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penting untuk pemangku kebijakan, lembaga pendidikan politik, pendidikan komunikasi Islam, serta masyarakat sipil dalam membangun budaya politik yang sehat. Dalam negara iklim demokrasi yang terus maju dan berkembang, komunikasi politik yang berakar pada nilai-nilai humanisme Islam dapat menjadi jembatan untuk mengurangi polarisasi, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas hubungan antara pemangku kebijakan dan rakyat. Karena itu, tesis ini mencoba menjawab tantangan zaman dengan mengangkat pentingnya kembali ke nilai-nilai kemanusiaan dalam komunikasi politik, yang dalam konteks Islam memiliki fondasi yang kokoh.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ruang kajian yang menarik antara humanisme Islam dan praktik komunikasi partai nasionalis. Penelitian ini tidak menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai humanisme Islam dapat muncul, diterjemahkan, dinegosiasikan, atau bahkan dibatasi dalam praktik komunikasi PDI Perjuangan.

Pemilihan penelitian merupakan salah satu hasil analisis tersetruktur peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian. Ada beberapa factor dalam pemilihan objek penelitian ini *pertama* karena PDIP merupakan partai yang besar di Indonesia sehingga memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan Masyarakat dan dapat merubah pola kehidupan Masyarakat, *Kedua* PDIP merupakan basis kursi terbanyak di parlemen khususnya Kota Bandung seperti yang sudah dijelaskan di atas, *ketiga* PDIP selain partai besar PDIP juga partai nasionalis yang berkembangnya cukup pesat padahal dalam lingkup mayoritas muslim, ini menjadi pertimbangan besar untuk melihat komunikasi yang dibawakan oleh partai tersebut, *keempat* banyaknya posisi-posisi vital negara ini yang diduduki oleh kader yang berasal dari partai ini, sehingga menarik sekali bagaimana pola komunikasi keatas dan ke lapangan dalam memupuk kepercayaan public dalam mengambil jatah kursi pimpinan.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada belum jelasnya bentuk humanisme Islam dalam komunikasi PDI Perjuangan. Apakah nilai kemanusiaan,

pembebasan, keadilan sosial, keberpihakan kepada rakyat, dan spiritualitas sosial hadir dalam pesan politik partai? Apakah nilai tersebut hanya muncul sebagai simbol, atau benar-benar menjadi dasar praktik komunikasi politik? Pertanyaan ini penting karena komunikasi partai politik dapat memengaruhi cara publik memahami hubungan antara agama, nasionalisme, demokrasi, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Humanisme Islam dalam Praktik Komunikasi Politik PDI Perjuangan di Kota Bandung**"** diarahkan untuk menganalisis praktik komunikasi PDI Perjuangan melalui perspektif humanisme Islam. Fokus penelitian diarahkan kepada beberapa aspek diantaranya: PDI Perjuangan memiliki basis ideologi nasionalis-Pancasila, tetapi tetap berkomunikasi dengan masyarakat Muslim; Praktik komunikasi politik PDI Perjuangan belum banyak dikaji melalui perspektif humanisme Islam; Nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi belum jelas posisinya dalam komunikasi politik PDI Perjuangan; Keberadaan BAMUSI menunjukkan adanya ruang komunikasi Islam dalam PDI Perjuangan, tetapi bentuk dan maknanya masih perlu dianalisis secara akademik; Komunikasi politik yang memakai nilai agama dapat memperkuat partisipasi, tetapi juga dapat menimbulkan tafsir yang beragam di ruang publik.

B. Fokus Penelitian

Pentingnya penelitian ini untuk memberikan wawasan juga sebagai salah satu solusi dalam mengembangkan komunikasi di masyarakat terutama dalam humanisme Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi adalah salah satu cara untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan hubungan beragama masyarakat agar tetap terjaga, karena konflik politik dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat dan bisa terjadi kapan saja sehingga perdamaian antar masyarakat yang harus dijaga saat terjadinya demokrasi di negera. Oleh sebab itu peneliti mengambil tiga fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk praktik komunikasi politik PDI Perjuangan dalam perspektif humanisme Islam di Kota Bandung?
2. Bagaimana nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi tercermin dalam pesan, simbol, dan strategi komunikasi politik PDI Perjuangan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Bagaimana PDI Perjuangan menegosiasikan nilai-nilai Islam dalam komunikasi politiknya sebagai partai nasionalis di tengah masyarakat Muslim Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara komprehensif komunikasi yang dibangun oleh para politikus dalam menggiring kepercayaan masyarakat untuk mendapat dukungan dengan menyentuh ranah keagamaan

Adapun fokus penelitian ini menyangkut kepada hal-hal berikut ini:

1. Mengungkap bentuk praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung berdasarkan perspektif humanisme Islam.
2. Mengetahui dan menjelaskan pencerminan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam pesan, simbol, serta strategi komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung.
3. Mengetahui cara PDI Perjuangan menegosiasikan nilai-nilai Islam dalam komunikasi politiknya sebagai partai nasionalis di tengah masyarakat Muslim Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian akan menghasilkan sesuatu yang baru sehingga penelitian yang baik akan memberikan dampak yang baik dalam hal teoritis ataupun praktis, berikut ini merupakan manfaat penelitian yang ini dicapai diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam ilmu komunikasi dan kajian komunikasi politik Islam. Sebagai landasan basis mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat. Terlebih untuk bidang dunia akademis menjadi ajang rujukan dan bahan diskusi dilingkungan pendidikan untuk para peneliti ataupun para mahasiswa dalam menemukan teori-teori dan aspek kebutuhan akademik lainnya. Perkembangan ilmu komunikasi harus terus ditunjang dengan pembaharuan-pembaharuan penelitian yang relevan dengan keadaan zaman tanpa meninggalkan aspek dasar di dalamnya.

Mengembangkan konsep baru tentang pendekatan humanistik berbasis Islam dalam komunikasi politik. Belakangan ini ilmu politik terus berkembang untuk mempengaruhi suara masyarakat dengan kajian ini semoga menambah pengetahuan dan pandangan dalam memilih komunikasi politik. Juga memberikan kontribusi pada kajian-kajian komunikasi yang berbasis nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini juga dapat memperkaya penggunaan tentang teori Humanisme Islam terutama konsep ilmu sosial profetik Kuntowijoyo dalam membaca pola praktek komunikasi partai politik nasionalis.

2. Manfaat praktis

Kepentingan praktis dalam pendidikan menjadi suatu keharusan, karena penelitian ini bukan hanya bahan bacaan dan diskusi tetapi lebih dari itu penelitian ini membawa perubahan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh khalayak banyak, seperti para politikus, aktivis masyarakat maupun LSM untuk menunjang keberhasilan dalam berkomunikasi. Telaah mendalam dalam praktik komunikasi semoga menjadi bahan pertimbangan sebagaimana harusnya pesan itu disampaikan.

Memberikan panduan bagi para politikus dalam menerapkan nilai-nilai humanisme Islam seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan sebagai manusia dalam komunikasi politik. Karena dengan adanya komunikasi ini menambah lahan perkembangan dalam komunikasi politik di Indonesia secara keseluruhan dan menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam merancang program komunikasi politik yang beretika dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi signifikan iklim politik dan sosial di kalangan politikus, generasi muda, menciptakan masyarakat yang lebih beradab, mengurangi polarisasi dan konflik politik akibat komunikasi politik yang tidak humanis.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan relevansi penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan:

Kesatu, M. Sabron Sukmanul Hakim (2020) penelitian dengan judul "Distorsi Humanisme dalam Konsep Islam Rahmatan lil'alamin di Indonesia" Al-Afkar Journal For Islamic Studies (Januari 2020): Vol. 3 No. 1. Penelitian ini mengkaji konsep Islam rahmatan lil'alamin yang semakin bergeser dari nilai-nilai humanisme. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Dimana hasil dari penelitian tersebut Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin masih banyak menyimpang dari humanisme, terlalu sempit dalam berpikir dan tidak lapang dada, sehingga menimbulkan justifikasi sesat terhadap orang yang tidak sepaham dengannya. Masih banyak dikotomi dalam pemikiran sehingga tidak tercapai Islam yang rahmatan lil'alamin. Perbedaan dengan penelitian ini menelusuri komunikasi humanisme Islam yang dibawa oleh para elit politik di Kota Bandung.

Kedua, Puput Dwi Lestari: "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Humanisme." Matan Journal of Islam and Muslim Society E-ISSN 2715-0119: Vol 2 no.1 (2020). Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan humanisme yang menggambarkan perbedaan pandangan mengenai nasib manusia. Bertanya apakah manusia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya atau tidak bisa menentukan nasibnya, tetapi ditentukan Tuhan. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang makna humanisme dengan cara kajian kepustakaan tentang teori-teori humanisme. Dengan metode deskriptif. Hasil dari tulisan ini menyatakan bahwa pandangan Gus Dur, aspek humanisme diturunkan dalam beberapa aspek penting, pertama jaminan kebebasan dalam beragama, kedua jaminan adanya perlindungan hak-hak dasar kemanusisaan, ketiga budaya yang demokratis, keempat perlindungan terhadap minoritas. Perbedaan dengan penelitian kali ini terletak pada ranah penerapan humanisme Islam dalam Politik.

Ketiga, Daden Fikruzzaman, Helnafi Ankesa (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Komunikasi Politik Partai Islam Menjelang Pemilu" penelitian ini menyoroti bagaimana para politikus menggunakan simbol-simbol Islam dalam komunikasi politik selama masa kampanye. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dapat menganalisis dan menggambarkan keadaan objek penelitian. Dengan hasil penelitian bahwa kampanye dengan tokoh-tokoh muslim membawa nilai Islam dan juga mobilisasi masyarakat. Bedanya dengan penelitian ini,

bagaimana komunikasi dijalankan secara berkesinambungan bukan hanya dalam satu masa pemilihan tetapi juga diterapkan dalam menjamin kehidupan masyarakat.

Keempat, Mhd. Latip Kahpi, Ali Syahbana Siregar, Sahru Romadon (2024) dalam penelitiannya yang berjudul " Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer" Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi politik Islam, termasuk narasi yang digunakan dan dampaknya dalam konteks politik kontemporer. Melalui analisis kualitatif terhadap berbagai sumber literatur, media massa, serta wawancara dengan tokoh politik dan akademisi, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana narasi politik Islam berkembang dan beradaptasi dalam menjawab tantangan dan peluang di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam memiliki ciri khas tersendiri yang ditandai oleh penggunaan simbol-simbol religius, pesan moral, dan retorika yang kuat untuk membangun dukungan politik dan legitimasi. Selain itu, dampak dari komunikasi politik Islam sangat beragam, mulai dari peningkatan partisipasi politik di kalangan umat Muslim hingga polarisasi sosial yang lebih dalam. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun komunikasi politik Islam berkontribusi positif dalam memperkuat identitas dan kesadaran politik umat, ia juga berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Kesimpulannya, dinamika komunikasi politik Islam sangat kompleks dan memainkan peran penting dalam politik kontemporer, menuntut perhatian lebih dalam dalam memahami implikasi sosial dan politiknya di berbagai konteks. Perbedaan dengan penelitian ini akan berfokus kepada satu objek penelitian dan penggunaan teori.

Kelima, Idris Thaha (2018) penelitian ini berjudul "PDI Perjuangan dan Islam (Kajian Atas Akomodasi Islam Dalam Politik)". Penelitian ini melihat adanya akomodasi politik yang berkembang dalam perjalanannya. Berfokus kepada bagaimana sebuah partai melihat mengkonvergensi politik untuk menambah kepercayaan public. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus. Metode ini didukung oleh dua teori utama yaitu akomodasi politik (hubungan agama dan politik) dan politik aliran. Peneliti memaparkan adanya bukti kuat dengan ungkapan bahwa PDI Perjuangan mengakomodasi aspirasi umat di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini mengacu kepada objek penelitian dan

teori yang digunakan yaitu penggajian mendalam komunikasi politik di Kota Bandung.

Penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus di Kota Bandung dan mengkaji secara lebih empiris tentang bagaimana nilai-nilai humanisme Islam direfleksikan dalam komunikasi politikus, baik dari sisi pesan, medium, maupun persepsi masyarakat. Sehingga penelitian ini menjadi sangat penting dalam menyampaikan pesan dan memaksimalkan kemampuan merubah persepsi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Seperti pada table 2.1 Tentang Penelitian Terdahulu (terlampir).

F. Landasan Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara humanisme Islam dan praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa komunikasi politik tidak hanya dapat dibaca sebagai strategi penyampaian pesan, pembentukan citra, atau upaya memperoleh dukungan elektoral, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung nilai kemanusiaan, keberpihakan sosial, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan humanisme Islam sebagai kerangka nilai dan humanisme profetik Kuntowijoyo sebagai teori utama untuk membaca praktik komunikasi politik tersebut (Kuntowijoyo, 2004; McNair, 2018).

Humanisme Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai pandangan yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat, berakal, bebas secara bertanggung jawab, dan memiliki tugas moral untuk membangun kehidupan yang adil dan manusiawi. Humanisme Islam berbeda dari humanisme sekuler karena tidak memutlakkan manusia sebagai pusat nilai, melainkan menempatkan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, humanisme Islam bersifat teosentris karena penghargaan terhadap manusia tetap berada dalam kerangka tauhid, amanah, keadilan, dan kemaslahatan (Assyaukanie, 2022; Zuhri, 2020a).

Untuk memperjelas kerangka analisis, penelitian ini menggunakan pemikiran Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik. Dalam pemikiran Kuntowijoyo, nilai profetik bersumber dari QS Ali Imran ayat 110 yang memuat

tiga unsur utama, yaitu amar ma'ruf, nahi munkar, dan tu'minuna billah. Ketiga unsur tersebut diterjemahkan ke dalam konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi berarti memanusiakan manusia; liberasi berarti membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan; sedangkan transendensi berarti mengarahkan tindakan sosial pada nilai ketuhanan dan tanggung jawab moral (Arum, 2018; Kuntowijoyo, 2004).

Humanisasi digunakan untuk membaca apakah komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung menghargai martabat masyarakat sebagai subjek politik. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sasaran kampanye, penerima janji politik, atau angka suara dalam pemilu. Komunikasi politik yang mengandung nilai humanisasi ditandai oleh penggunaan bahasa yang santun, penghargaan terhadap aspirasi warga, sikap inklusif, dialog dengan masyarakat, serta upaya menghindari ujaran kebencian, penghinaan, dan manipulasi identitas (Cangara, 2016; Kuntowijoyo, 2004).

Liberasi digunakan untuk membaca apakah komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung memiliki keberpihakan terhadap masyarakat kecil, kelompok lemah, dan warga yang mengalami persoalan sosial. Dalam kerangka ini, komunikasi politik tidak cukup hanya menyampaikan pesan atau membangun citra, tetapi perlu membuka ruang aspirasi, memberi pendidikan politik, merespons keluhan masyarakat, serta membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, nilai liberasi menuntut komunikasi politik yang berpihak pada keadilan sosial dan tidak menjadikan rakyat kecil sekadar simbol politik (Arum, 2018).

Transendensi digunakan untuk membaca apakah praktik komunikasi politik tersebut dijalankan dengan tanggung jawab moral. Dalam perspektif transendensi, komunikasi politik tidak boleh hanya diarahkan pada kemenangan, popularitas, atau kepentingan elektoral. Komunikasi politik perlu dijalankan dengan kejujuran, amanah, kesantunan, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Nilai transendensi juga penting untuk membedakan antara penggunaan agama sebagai sumber etika publik dan penggunaan agama sebagai alat manipulasi politik atau politik identitas (Wahid, 2006).

Selain Kuntowijoyo sebagai teori utama, penelitian ini menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai teori pendukung. Nurcholish Madjid membantu memperkuat pemahaman tentang Islam substantif, keindonesiaan, kemodernan, dan keadaban publik. Pemikiran ini penting karena menunjukkan bahwa nilai Islam tidak harus selalu hadir dalam bentuk simbol politik Islam, tetapi dapat hadir melalui kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Abidin, 2014; Madjid, 2008).

Sementara itu, pemikiran Abdurrahman Wahid membantu memperkuat pemahaman tentang Islam sebagai etika kemanusiaan. Gus Dur menekankan pribumisasi Islam, pluralisme, penolakan kekerasan, dan pembelaan terhadap kelompok lemah. Perspektif ini relevan karena penelitian ini tidak menilai PDI Perjuangan sebagai partai Islam, tetapi membaca apakah praktik komunikasi politik partai nasionalis tersebut mengandung nilai Islam secara substantif, terutama dalam bentuk pembelaan terhadap manusia, penghormatan terhadap perbedaan, dan orientasi pada kemaslahatan publik (Qodir & Nashir, 2019; Wahid, 2006).

Komunikasi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penyampaian, pertukaran, dan pemaknaan pesan politik yang melibatkan aktor politik, masyarakat, media, dan konteks sosial-politik tertentu. Komunikasi politik tidak hanya berlangsung dalam kampanye pemilu, tetapi juga dalam kegiatan partai, dialog warga, reses, pelayanan publik, media sosial, pernyataan politik, dan tindakan sosial yang mengandung pesan politik. Karena itu, praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung perlu dilihat dalam bentuk pesan, tindakan, media, relasi dengan masyarakat, dan respons terhadap persoalan publik (Cangara, 2016; McNair, 2018; Nimmo, 1978).

Etika komunikasi Islam juga digunakan sebagai penguat kerangka analisis. Prinsip *qaulan sadidan*, *qaulan balighan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan kariman*, *qaulan layyinan*, dan *qaulan maysuran* memberi ukuran moral dalam menilai pesan politik. Selain itu, nilai amanah, keadilan, *tabayyun*, dan kemaslahatan digunakan untuk melihat apakah komunikasi politik dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, tidak manipulatif, tidak menyebarkan kebencian, serta tidak mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik (Hefni, 2015; Imaduddin, 2019; Muhardinsyah, 2017).

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menempatkan praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung sebagai objek yang dianalisis melalui tiga nilai utama humanisme profetik. Nilai humanisasi digunakan untuk melihat penghargaan terhadap martabat warga. Nilai liberasi digunakan untuk melihat keberpihakan kepada rakyat kecil dan pembebasan dari persoalan sosial. Nilai transendensi digunakan untuk melihat kejujuran, amanah, tanggung jawab moral, dan orientasi kemaslahatan dalam komunikasi politik. Ketiga nilai ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana humanisme Islam hadir dalam praktik komunikasi politik partai (Arum, 2018).

Dengan demikian, alur kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: humanisme Islam menjadi kerangka nilai umum; humanisme profetik Kuntowijoyo menjadi teori utama; pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menjadi teori pendukung dalam konteks Islam Indonesia; komunikasi politik menjadi objek kajian; dan etika komunikasi Islam menjadi ukuran moral dalam membaca praktik komunikasi politik. Melalui alur tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi muncul dalam praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan PDI Perjuangan sebagai partai Islam, tetapi untuk membaca kemungkinan hadirnya nilai humanisme Islam dalam praktik komunikasi politik partai nasionalis. Dengan pendekatan ini, nilai Islam dipahami secara substantif, yaitu sebagai nilai kemanusiaan, keadilan, pembebasan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, fokus penelitian terletak pada praktik komunikasi politik: bagaimana pesan disampaikan, bagaimana masyarakat diperlakukan, bagaimana aspirasi direspons, dan bagaimana nilai moral hadir dalam tindakan politik partai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

Skema kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

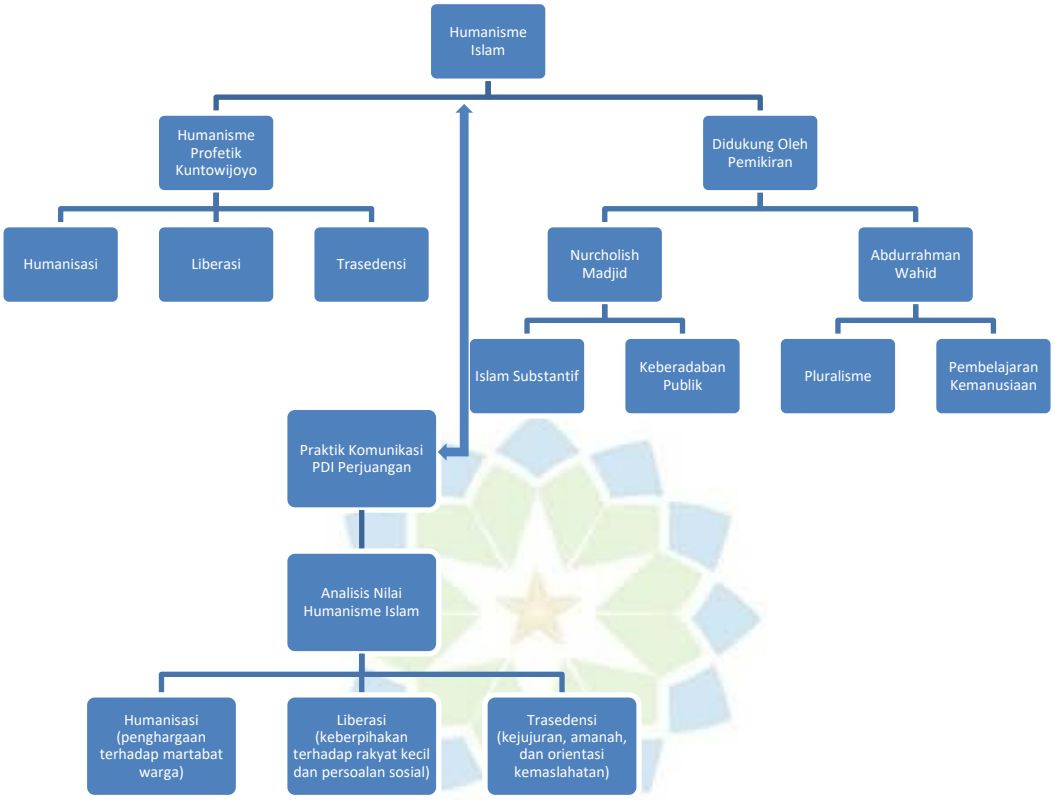

Dengan skema tersebut, penelitian ini memiliki arah analisis yang jelas. Pertama, peneliti mengidentifikasi praktik komunikasi politik PDI Perjuangan di Kota Bandung. Kedua, peneliti membaca praktik tersebut melalui tiga nilai humanisme profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga, peneliti memperkuat pembacaan tersebut dengan perspektif Islam substantif Nurcholish Madjid, humanisme pluralis Abdurrahman Wahid, serta etika komunikasi Islam. Keempat, peneliti menarik kesimpulan mengenai bentuk humanisme Islam yang hadir dalam praktik komunikasi politik partai tersebut.